

BAB V

MASUKNYA BELANDA KE MANDAILING

5.1 Pengaruh Kekuasaan Belanda di Mandailing

Berdasarkan latar belakang historisnya, apa yang dinamakan sebagai kawasan Tanah Mandailing cukup luas. Kawasan itu hampir meliputi wilayah yang termasuk sebagai Kabupaten Tapanuli Selatan (Yamin, 1956 : 15). Oleh karena itu tidaklah mengherankan bila pembentukan Keresidenan Tapanuli pada awal tahun (1842) oleh Pemerintahan Kolonial Belanda, maka kawasan yang mencakup Tapanuli Selatan itu disebut sebagai salah satu bagian wilayah pemerintahan yang disebut sebagai afdeeling Mandailing.

Untuk membicarakan bagaimana Pemerintahan Kolonial Belanda (Hinda Belanda) melaksanakan sistem dan struktur pemerintahannya di daerah ini, kita tidak bisa menyampingkan peranan agama Islam ataupun kaum Padri. Sebagaimana Pemerintahan Belanda pada awal-awal kekuasaannya di daerah Mandailing masih memberlakukan bentuk dan sistem pemerintahan tradisional yang ada. Sebaliknya pemerintahan tradisional yang ada setelah kaum Padri menguasai sebagian besar daerah ini atau setelah agama Islam menjadi agama yang dianut oleh penduduknya, telah merubah struktur dan sistem pemerintahan tradisional yang ada. Kalau pada waktu sebelumnya Raja Panusunan yang membawahi beberapa Kampung (huta) hanya mempunyai peranan tertentu saja, yaitu dalam masalah adat istiadat saja, sedangkan Raja Pamusuk mempunyai peranan yang lebih dominan dalam setiap kampung yang dikuasainya. Akan tetapi

setelah wilayah ini dikuasai kaum Padri, atau agama Islam lebih eksis dari pada nilai adat istiadat, maka sistem dan struktur pemerintahan tradisional ini mengalami perubahan. Raja Panusunan dirubah sebutannya sebagai kepala "kuria." Dengan demikian seorang Raja Panusunan yang mengepalai sebuah kuria di setiap kuria, bukan saja berkuasa di "keagamaan" tetapi juga di bidang politik, ekonomi dan sosial.

Yang jelas, kalau sebelumnya tokoh tokoh tradisional pada masa Pra Padri memerintah berlandaskan adat istiadat, maka setelah Padri mereka berlandaskan syariat (norma norma menurut agama Islam). Hal ini terus berlanjut sampai Kolonial Belanda menguasai Tanah Mendailing.

Ketika tentera Belanda berhasil menaklukkan pasukan Padri di Sumatera Barat, mereka terus kearah selatan atau kawasan Mandailing, Padang Lawas, Angkola, bahkan sebahagian wilayah Labuhan Batu. Pemerintahan Kolonial berhasil membujuk sebahagian tokoh tokoh pemerintah tradisional untuk melawan pasukan kaum Padri yang dipimpin oleh Tuanku Tambusai. Di antara tokoh-tokoh tradisional itu adalah Patuan Gogar Tonga Ari (dari kawasan Limau Manis/perbatasan Sumatera

Barat dengan Mandailing), Sutan Melayu (dari Pakantan) dan Mangaraja Gadombang (dari Huta Godang).

Tindakan yang terlalu radikal oleh Kaum Padri untuk menyampaikan adat istiadat yang berlaku, merupakan salah satu sebab tokoh tokoh tradisional ini mau terbujuk oleh pasukan kolonial Belanda.

Akhirnya pasukan kolonial Belanda berhasil mengalahkan perlawanan Kaum Padri ditandai dengan direbutnya benteng terakhir Tuanku Tambusasi di Dalu Dalu (28 Desember 1838). Sejak itu Pemerintah Kolonial mulai melaksanakan pemerintahannya di kawasan ini, Struktur pemerintahan yang sedang berlaku memang tidak segera mengalami perubahan. Kepala kuria masih tetap diberlakukan tapi hanya mengurus soal-soal "keagamaan" saja. Para kepala kuria yang diangkat oleh pemerintah kolonial pada umumnya tetap berasal dari keturunan tokoh tokoh tradisional.

Sesuai dengan situasi dan kondisi wilayah pemerintahan tradisional yang ada di kawasan Tapanuli banyak mempunyai dasar dasar persamaan, maka formasi dan kedudukan "kepala kuria" ini juga diterapkan di daerah daerah lainnya yang ada di kawasan Tapanuli. Pengangkatan masih diserahkan pada kelompok masyarakatnya masing-masing, tetapi pemerintah kolonial kolonial berusaha mempengaruhi agar calon yang dimenangkan mempunyai loyalitas.

Dalam perkembangan selanjutnya, kepala kepala kuria ini memang berhasil menjadi alat kekuasaan pemerintah kolonial. Akan tetapi diantara mereka tak jarang pula tetap konsisten berpihak kepada rakyat dan memperjuangkan nasib mereka. Diantara mereka itu adalah Sutan Mangkujur di Tanah Mandailing dan

Patuan Na Lobi di Padang Lawas. Akibatnya adalah pemerintahan kolonial terpaksa mengadakan perubahan-perubahan baik struktur maupun sistem pemerintahan di daerah-daerah yang dikuasainya. Hal itu dapat kita lihat dalam uraian berikutnya.

Kawasan Tapanuli Selatan atau yang pada awal terbentuknya pemerintahan keresidenan Tapanuli dimasukkan sebagai afdeeling Mandailing, berdasarkan ciri-ciri sub-etnis yang ada ataupun perbedaan marga-marga, secara garis besar terbagi menjadi :

- 1) Angkola Sipirok
- 2) Padang Lawas atau di daerah setempat disebut sebagai Padang Bolak
- 3) Mandailing.

5.2. Migrasi Orang Mandailing ke Sumatera Timur

Migrasi orang Mandailing telah menyebabkan mereka tersebar hampir di seluruh Indonesia bahkan luar negeri, dan secara lokal daerah migrasi pertama adalah Sumatera Barat dan Sumatera Timur (Pandapotan, 2005 : 18).

Ketika suku Batak Mandailing ini Tapanuli Selatan berpindah ke Pantai Timur Sumatera Barat pada paroh pertama abad ke dua puluh (Peizer, 1978 :100), mereka di tarik masuk Melayu sebagai Melayu Dusun. Namun pemasukan Mandailing menjadi Melayu itu lebih mudah dibanding pemasukan orang Karo Medan karena kebanyakan sudah beragama Islam, sehingga mudah di terima oleh komunitas Islam Melayu (Peizer, 1978 :100). Kebanyakan perantau Mandailing

lebih berpendidikan di banding suku Melayu, sehingga berhasil memperoleh kemudahan baik dalam komunitas Melayu.

Mandailing terdidik, yang tamat dari Madrasah di Mandailing di pekerjaan sebagai Kadhi, Imam, guru atau kerami dalam birokrasi kesultanan-kesultanan Melayu. Walau suku-suku karo dan simalungun, berjumlah lebih banyak di banding suku Mandailing di wilayah pesisir waktu itu, peran suku Mandailing akan komunitas Melayu lebih berarti. Ini terutama di dapati di kehidupan religius, kebanyakan ulama adalah dari suku Madailing.

Para migran Mandailing di Sumatera Timur yang telah berpendidikan ternyata banyak yang bekerja sebagai pegawai pemerintahan maupun perkebunan-perkebunan milik Belanda. Dalam hal ini Masykuri (1981:35-36) menyebutkan bahwa :

“Perkembangan perkebunan itu memerlukan tenaga-tenaga para karyawan yang mempunyai pengetahuan tulis dan baca untuk pelaksanaan administrasi di perkebunan milik Belanda, kebutuhan ini kemudian dapat dipenuhi oleh tenaga – tenaga yang berasal dari Tapanuli Selatan”

Para migran Mandailing di Sumatera Timur yang bekerja pada administrasi pemerintah Belanda biasanya dipekerjakan sebagai kerani, juru ukur, ahli mesin dan teknis lainnya. Para lulusan dari *Madrasah*, Sultan Deli mempekerjakan mereka sebagai *Kadhi*, imam serta jabatan-jabatan lain di pengadilan agama. Sedangkan yang tamatan MULO dan AMS (sekarang setingkat SMP dan SMA). Oleh karenanya jabatan-jabatan yang cukup baik dalam kantor-kantor Pemerintah Belanda dapat diraih mereka. Para migran Mandailing di Sumatera Timur hidup dan membaaur dengan Melayu Muslim, demikian pula selanjutnya menyusul orang-orang Sipirok, Angkola dan Padanglawas dan mereka

mengaku sebagai orang Mandailing dengan tidak menggunakan marga-marga mereka sebagaimana pengalaman masyarakat Mandailing, sehingga orang Melayu menganggap mereka sama dengan orang Mandailing di Medan. Para migran ini ikut berpartisipasi dalam semua kegiatan sosial, ekonomi dan Politik. Hal ini dapat dilihat dari banyaknya tokoh-tokoh pers yang beretnis Mandailing (Pewartu Deli dan Syarikat Tapanuli) di Kota Medan. Kesultanan Deli baru menyadari perbedaan mereka setelah peristiwa tanah wakaf di pekuburan Sei-Mati pada 1923, perbedaan di antara mereka disebabkan karena perkembangan yang berbeda dari tanah asal.

5.3. Komposisi dan Pemukiman Etnik di Kota Medan

Pesatnya perkembangan perkebunan menyebabkan penduduk kota Medan bertambah dari 200 orang pada tahun 1823 menjadi 14.000 jiwa pada tahun 1905. Setelah kemerdekaan jumlahnya terus meningkat, yakni dari 479.000, tahun 1961 menjadi 1.107.509 pada tahun 1980. berdasarkan sumber yang diperoleh gambaran komposisi etnis di Kota Medan dapat dilihat pada Tabel 5.1.

Tabel 5.1.
Komposisi Etnis di Medan pada Tahun 1930-1981

No.	Etnis	1981 (N = 1.294.132)	1930 (N = 76.584)
1.	Jawa	29,41%	24,90%
2.	Batak Toba	14,11%	1,07%
3.	Cina	12,84%	35,63%
4.	Mandailing	11,91%	6,43%
5.	Minangkabau	11,93%	7,30%
6.	Melayu	8,57%	7,06%
7.	Karo	3,99%	0,19%
8.	Aceh	2,19%	-
9.	Sunda	1,90%	1,58%
10.	Simalungun	0,67%	-
11.	Dairi	0,24%	2,34%
12.	Nias	0,18%	-
13.	Lain-lain	3,04%	14,28%
	Jumlah	100%	100%

Sumber : Usman Pelly, *Urbanisasi dan Adaptasi : Peranan Misi Budaya Minangkabau dan Mandailing*, Jakarta : LP,ES, 1994, hal. 81.

Dari tabel di atas terlihat bahwa kelompok etnik Mandailing menempati urutan keempat terbesar di Medan, dari tahun 1930 sampai dengan 1981.

Berdasarkan keterangan di atas, dapat dilihat bagaimana sebenarnya bentuk pemukiman yang bersifat etnik di Kota Medan. Pada dasarnya sebuah kampung di Medan adalah kelompok rumah dan pemukiman perantau. Dalam

permukiman ini hubungan-hubungan dan kegiatan tradisional kelompok etnik dari kampung halaman mereka akan tetap dipertahankan. Upacara yang menyangkut siklus kehidupan dan perkumpulan kesukuan maupun keagamaan tetap dipertahankan, serta bahasa daerah masing-masing tetap dipergunakan dalam pembicaraan sehari-hari. Anggota masing-masing kelompok etnis di dalam sebuah kampung tersebut, cenderung memiliki pekerjaan yang sama. Pemukiman ini melestarikan kesinambungan budaya melalui interaksi sehari-hari, tukar pikiran mengenai pekerjaan, sanak keluarga dan bagaimana menggunakan adat untuk menyelesaikan masalah yang muncul di perantauan baru. Tidak heran bila kampung-kampung etnik ini akan menyerap para perantau yang datang karena mereka memakai sanak saudara dari desa asal sebagai penghubung dalam mencari pekerjaan dan penginapan sementara.

Kampung etnis pada jaman Kolonial Belanda menjadi ciri kota-kota besar di Indonesia, sejalan dengan kebijakan Pemerintah Kolonial Belanda. Batas-batas permukiman kelompok etnik juga relatif jelas, misalnya pada tahun 1905, kampung Cina, Mandailing, Arab, India dan Eropah, Minangkabau, Banten dan Melayu. Tetapi sejak kemerdekaan, seiring dengan semangat nasionalisme dan perluasan kota Medan, batas-batas itu semakin kabur dan hilang, sebagai contoh, kota Matsum II, tadinya adalah kampung Melayu, tetapi dalam tahun 1981 diganti oleh para perantau Minangkau. Pemukiman Cina dan Minangkabau terkonsentrasi di dekat pusat bisnis di kota. Etnik Mandailing dan Batak Toba tersebar di pinggiran kota dalam kampung-kampung etnis yang terpisah. Meskipun demikian

ada juga etnis Mandailing dan Batak Toba yang bermukim disekitar pusat bisnis, tetapi jarang sekali, dibandingkan dengan etnis Minangkabau.

5.4. Pemukiman Etnis Mandailing

Pemukiman etnis Mandailing bersifat lebih permanen bila dibandingkan dengan pemukiman etnis lain, karena etnis Mandailing memandang darah rantau sebagai tempat tinggal menetap, mereka tidak selalu mengikuti pembangunan pusat-pusat perbelanjaan karena mereka lebih memilih bekerja dibidang kepegawaian.

Pegawai-pegawai Sultan Deli memperoleh tanah dan rumah di Sungai Mati, Kampung Mesjid, Glugur dan kota Matsum. Di daerah ini banyak sekali dihuni oleh guru, pegawai Sultan Deli, misalnya Kadhi, Imam, Juru tulis dan Jaksa. Etnis Mandailing yang bekerja di perkebunan yang bermukim di kota Matsum dan Sei-Agul. Sementara etnik Mandailing yang bekerja sebagai pegawai harian dan petani kebanyakan bertempat tinggal di Sungai Mati, Glugur, Petisah, namun ada juga sebagian kecil pegawai etnis Mandailing bertempat tinggal di sekitar lokasi pusat-pusat pasar (Pelly, 1994:95-98).

Sejalan dengan pembangunan kota Medan, maka harga jual tanah semakin tinggi dan mahal dan terjadinya pemekaran wilayah Katamadya Medan yang semakin pesat. Sampai menjangkau wilayah-wilayah perkebunan yang berbatasan dengan kabupaten Deli Serdang pada tahun 1973, maka banyak etnis Mandailing yang menetapkan untuk tinggal di daerah yang baru, daerah-daerah yang masih kosong dapat dijadikan sebagai tempat pemukiman yang baru.

Beberapa kelompok pemukiman etnik Mandailing di pinggiran kota Medan adalah daerah Sidoarjo, Tegal Sari, Binjai, Helvetia, Tembung dan Bandar Selamat. Etnik Mandailing kerap memanfaatkan sentimen keislamannya untuk mencari lokasi yang nyaman di luar kota.

5.5. Asosiasi Sukarela

Dalam bagian ini akan diuraikan mengenai perkumpulan-perkumpulan yang dibentuk oleh para migran dan juga pengaruhnya terhadap kehidupan mereka terutama dalam memperat hubungan-hubungan sosial diantara sesama migran, perkumpulan yang dibentuk para migran dikota Medan adalah persatuan yang bersifat keagamaan maupun kesukuan.

5.5-1 Asosiasi Keagamaan

Untuk pertama kalinya, etnis Mandailing mengenal pendidikan melalui kaum Padri yang membawa aliran Islam Wahabi yaitu membuat etnis Mandailing mengalami reformasi dalam hal ajaran keislaman dari jaman kekafiran. Hal ini dilihat dalam keterlibatan etnik Mandailing pada organisasi Al-Washliyah

Organisasi Alwashliyah didirikan pada tanggal 26 Oktober 1930 yang dipimpin oleh Ismail Banda dan wakilnya Abdul Rachman Syihab, yang beranggotakan para migran Mandailing terutama kaum muda. Program utama organisasi Al-Washliyah adalah mendirikan sekolah-sekolah di desa maupun di kota, meskipun pada awalnya kurang mendapat tanggapan oleh masyarakat Mandailing dan Melayu, tetapi setelah terjadi beberapa kali perubahan kepengurusan, organisasi ini mulai diminati oleh masyarakat Mandailing dan

Melayu. Ahmad Nasution (1975 : 18) menyebutkan, setelah terjadi reorganisasi dan H. Hasan Maksum Daulay menjadi penasehat Al-washliyah, maka organisasi ini menjadi populer dan beberapa cabang madrasahnyanya didirikan di kota-kota sekeliling Sumatera Timur.

Al-washliyah juga aktif dalam kegiatan-kegiatan sosial lainnya seperti membantu masyarakat dalam berbagai fardh khifayah (kewajiban), dalam lingkaran hidup ; kematian, kelahiran, khitanan dan perkawinan, organisasi Al-washliyah juga memiliki arti ekonomi dan politik bagi etnik Mandailing terutama kedekatannya dengan kesultanan Melayu. Hingga tahun 1941 Al-washliyah menjadi organisasi yang penting di Sumatera Timur dengan mengelola 12500 pelajar dalam 242 sekolah dan Madrasah (Joenoos 1957:171).

Setelah kemerdekaan Al-washliyah semakin berkembang dengan mendirikan sekolah lanjutan dan Perguruan Tinggi, seperti IKIP Al-washliyah, salah satu yang terdapat di kota Medan yang sekarang berubah menjadi Universitas Alwashiliyah (UNIVA)

Di Bandar Selamat terdapat sekolah Al-washliyah yang menyelenggarakan pendidikan umum dan agama, banyak guru dan muridnya terdiri dari etnik Mandailing. Terdapat juga beberapa sekolah mulai dari tingkat Taman Kanak-kanak (TK), Sekolah Dasar (SD), dan juga Madrasah Al-Washliyah.

Dalam pendidikan non formal, pengajian-pengajian yang diadakan di mesjid-mesjid banyak dikoordinasi oleh etnik Mandailing. Dalam pengajian ini tidak ada dana khusus dari organisasi Al-Washliyah, pengajian terlaksana berkat

adanya sumbangan masyarakat khususnya para pengikut pengajian (swadaya masyarakat)

5.5.2. Asosiasi Kesukuan

Dalam rangka membina perkumpulan kesukuan amatlah penting, maka migran Mandailing di kota Medan juga tidak kalah dengan membentuk perkumpulan-perkumpulan yang bersifat kesukuan yang beranggotakan etnik Mandailing. Perkumpulan kesukuan yang dimaksud seperti Himpunan Keluarga Besar Mandailing (HIKMA) dan Yayasan Pengkajian Budaya Mandailing (YAPE BUMA).

Perkumpulan kesukuan ini tidak saja terdapat di kota Medan, melainkan menurut Razzak Lubis (), Ikatan Kebajikan Mandailing Malaysia (IMAN) yang didirikan pada tahun 1979, di Malaysia. Tujuan dari perkumpulan ini adalah untuk menyalurkan penelitian belajar, pelestarian, serta kewajiban dan promosi bahasa, kebudayaan serta sastra etnik Mandailing. Di Malaysia IMAN sudah berhasil menaikkan "*Gordang Sambilan*" dan menjadikannya dikenali oleh masyarakat terutama sebagai Assambel musik resmi di negara bagian Slangor-Malaysia, kini Gordang Sambilan dijadikan sebagai Festival tahunan dalam perayaan akhir bulan puasa. Selain IMAN, kelompok kelahiran Malaysia migran Mandailing juga telah membentuk kelompok yang dinamai "Lembaga Adat Mandailing" (LAMA)

5.6. Dinamika Sosial Budaya

Dinamika identitas etnik dimulai dengan masuknya agama Islam ke Mandailing tahun 1816 yang dibawa oleh kaum Padri dan dianut oleh masyarakat

Mandailing telah merubah struktur dan sistem pemerintahan menjadi "Kadhi" yang kekuasaannya bertambah luas, jelasnya tokoh-tokoh tradisonal memerintah berlandaskan syariat Islam (norma-norma menurut agama Islam).

Adat-istiadat masyarakat Mandailing yang sebelum masuknya kaum Paderi, mendapat pengaruh dari Hinduisme, seperti kepercayaan terhadap animisme (sipele begu), dan masuknya pengaruh agama Islam dan disusul dengan pengaruh kolonialisme telah merubah kepercayaan masyarakat Mandailing menjadi ajaran agama Islam.

Tetapi, meskipun kaum Paderi tidak berhasil untuk mendesak masyarakat Mandailing dengan seketika menganut agama Islam, dan perjuangan diakhiri dengan kekerasan, kaum Paderi telah meninggalkan bekas-bekas (agama Islam) yang jelas didalam kehidupan masyarakat Mandailing , Schrike (1973:20), dan pada gilirannya masyarakat Mandailing mempunyai pandangan bahwa "*Hombar do adat dohot ibadat*" yakni Adat dan agama berdampingan".

Dalam perkembangannya, kepercayaan orang Mandailing terhadap agama Islam semakin mendalam terbukti dengan misi kristen yang datang setelah Belanda menguasai daerah tersebut, mengalami kegagalan untuk menarik masyarakat Mandailing yang beragama Islam untuk memasuki agama Kristen dan perkembangan selanjutnya agama lain tidak pernah terjadi dari dahulu sampai sekarang.

Dinamika identitas etnik selanjutnya, masuknya Belanda ke Mandailing tahun 1833 dapat dikatakan secara damai dalam arti pada waktu itu mereka sama-sama sedang menghadapi perlawanan dengan kaum Paderi setelah masuk dan

berkembangnya kekuasaan kolonial Belanda, selanjutnya Belanda berhasil membujuk tokoh-tokoh tradisional seperti Sutan Mangaraja Gadangbang dari Pakuantan. Selanjutnya, kolonial Belanda mengadakan organisasi dalam pemerintahannya dengan mengganti Raja Panusunan menjadi kepala "Kuria". kepala "Kuria" berfungsi sekaligus sebagai Kepala pemerintahan dan kepala (raja) adat, dengan demikian kepala kuria berhasil menjadi alat kekuasaan kolonial.

Penguasa tradisional di Mandailing selanjutnya, seperti Sutan Mangkukur tidak pula patuh pada kolonial Belanda melainkan beliau menentang kekuasaan kolonial Belanda. Oleh sebab itu Pemerintah kolonial merubah lagi struktur dan pemerintahan yakni kawasan Tapanuli dibawah *afdeling Mandailing* kini berubah menjadi *afdeling Padang Sidempuan*, yang terbagi menjadi : 1) Angkola/ Sipirok, 2) Padanglawas atau Padang Bolak, 3) Mandailing. Pada saat itu juga sekitar abad ke 19 terjadi migrasi orang Mandailing ke Sumatera Timur. Stratifikasi sosial yang terdiri dari : 1). Kaum bangsawan atau Namora-mora, 2) Orang kebanyakan atau Halak na Jaji, 3) Budak-budak atau hatoban.

Pada tahun 1876, pemerintah kolonial Belanda membebaskan status perbudakan yang ada di Mandailing ini.

Perkembangan yang paling menonjol pada masa pemerintah kolonial Belanda adalah dalam bidang pendidikan formal yang sebelumnya masyarakat tidak mengenalnya. Pada tahun 1853 untuk pertama kalinya Sekolah Dasar dibuka, dan ini berlanjut terus hampir diseluruh Mandailing dan berkembang dalam lingkungan masyarakat yang lebih luas. Status orang berpendidikan menjadi pusat orientasi masyarakat yang menyebabkan terdorongny masyarakat

untuk mengikuti pendidikan, selanjutnya, kegiatan pendidikan yang diselenggarakan kolonial Belanda, banyak membawa perubahan dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat terutama dengan dibukanya perkebunan Belanda di Sumatera Timur.

Dinamika sosial budaya selanjutnya, terjadinya migrasi orang Mandailing baik sebelum maupun setelah kemerdekaan ke Sumatera Timur, sebelum kemerdekaan orang Mandailing telah bermigrasi ke Sumatera Timur, untuk memperoleh pekerjaan. Pekerjaan yang ditekuni adalah sebagai pedagang, guru agama dan pegawai.

Setelah kemerdekaan migran Mandailing di Sumatera Timur adalah orang-orang yang telah terdidik, sehingga terjadi perubahan dalam memilih pekerjaan. Mereka lebih memilih bekerja sebagai pegawai pemerintahan. Para migran setelah kemerdekaan di Sumatera Timur ini (Mandailing, Minangkabau, Aceh, Sunda dan Jawa) orang Mandailing termasuk migran yang mudah mendapatkan pekerjaan-pekerjaan di bidang kepegawaian, karena selain terdidik mereka beragama Islam dan kurang mendapatkan persaingan dengan etnik lainnya.

Orang Mandailing cenderung memandang daerah rantau sebagai tempat menetap permanen (Pelly, 1994:95). Itulah sebabnya orang Mandailing lebih memilih tempat tinggal di pinggiran kota karena disana dapat membeli tanah yang luas dan membangun rumah yang besar, harganya juga tidak terlalu mahal seperti di pusat kota, dan tentram (tenang), dan pemilikan tempat tinggal harus seiman dengan lingkungannya.

Kehidupan sosial dan religius migran Mandailing dikembangkan dalam asosiasi-asosiasi sukarela asosiasi-asosiasi religius, orang Mandailing adalah Al-Juni Yatulwasliyah yang didirikan tanggal 30 November 1950 di Medan.

Selanjutnya juga mendirikan perkumpulan kesukuan seperti Himpunan keluarga Besar Mandailing (HIKMA) dan Yayasan Pengkajian Budaya Mandailing (YAPE BUMA). Demikian pula halnya dengan para migran di Malaysia dengan membentuk Ikatan Kebajikan Mandailing Malaysia (IMAN) dan Lembaga Adat Mandailing (LAMA).

Secara umum migran Mandailing di Sumatera Timur baik dalam pekerjaan maupun dalam kehidupannya, dapat dibedakan dengan etnis lainnya.

Budaya Mandailing hampir sama dengan Batak Toba. Budaya ini mempunyai suatu identitas bagi setiap etnik. Demikian pula dengan masyarakat Mandailing di Sumatera Timur. Latar belakang yang hampir sama ini, mempengaruhi orientasi kegiatan budaya sehari-hari, terlebih-lebih ditengah-tengah masyarakat majemuk. Dengan budaya tersebut, maka orang Mandailing berusaha mengangkat status kebudayaannya dengan identitas yang berbeda, untuk membedakan masyarakat Mandailing dengan suku Batak lainnya.

Identitas ini terpantul dan dimanifestasikan dalam kegiatan adat-istiadatnya, baik dalam suka (perkawinan) maupun dalam duka (kemalangan) maupun kelahiran, proses upacara adat (cenderung bernuansa ke arah agama Islam. Islam sebagai agama yang dianutnya berlaku dalam sendi-sendi kehidupan dan kegiatan adat/budaya.

Dengan demikian, dinamika identitas etnik Mandailing telah mengalami suatu proses sejarah yang panjang, yang pada akhirnya dapat menentukan dasar kebudayaan identitas Mandailing.

